

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SEMARANG**

Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id
fawwazaldi@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya tak terkecuali kota Semarang, untuk meminimalisir jumlah angka kecelakaan yang terjadi diperlukan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui kolaborasi, karena setiap *stakeholders* tidak bisa bekerja sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan kolaborasi *stakeholders* dalam keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam kolaborasi. Teori yang digunakan yaitu model *collaborative governance* Ansell and Gash dan De Seve. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *collaborative governance* dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dilihat kondisi awal, desain institusional dan proses kolaboratif sudah berjalan baik, tetapi kepemimpinan fasilitatif belum maksimal pelaksanaannya. Faktor pendorong yang mempengaruhi kolaborasi yaitu *networked structure*, *commitment to a common purpose*, *distributive accountability/responsibility*, dan *information sharing*, sedangkan yang menjadi penghambat hanya faktor *access to resource*. Rekomendasi yang diberikan yaitu melaksanakan kepemimpinan fasilitatif lebih maksimal lagi dengan memanfaatkan Forum LLAJ yang ada dan mengadakan rekrutmen pegawai kontrak serta melakukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien.

Kata kunci : kolaborasi, *stakeholders*, dan keselamatan lalu lintas.

**COLLABORATIVE GOVERNANCE IN AN EFFORT TO TRAFFIC AND
ROAD TRANSPORTATION SAFETY IN SEMARANG CITY**

Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri

ABSTRACT

The number of accidents that occurred in Indonesia continues to grow each year is no exception Semarang City, to decrease the number of accidents that happen takes the role of stakeholders in the implementation of traffic and road transportation safety through collaboration because each stakeholder can't work alone. The purpose of this research was to know how the collaboration of stakeholders in the implementation of traffic and road transportation safety and analyze the factors driving and inhibiting the collaboration. The writer used the model of collaborative governance from Ansell and Gash, and De Seve. The method of this study was descriptive qualitative research method. The instruments for collecting the data were interviews, literature study, observation, and documentation. The results showed collaborative governance in the implementation of traffic safety and road transport in Semarang seen first conditions, institutional design, and collaborative process has been running well, but not optimal implementation of facilitative leadership. The driving factor which affects the collaboration that is networked structure, commitment to a common purpose, distributive accountability/responsibility, and information sharing, while the only factor inhibiting access to the resource. The recommendations given are implementing more maximal facilitative leadership by leveraging existing LLAJ Forum and held a contract employee recruitment and planning more effective and efficient.

Keyword : collaboration, stakeholders, and traffic safety.

PENDAHULUAN

Collaborative Governance dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

Dalam kaitannya dengan Administrasi Publik, *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri. *Collaborative Governance* juga merupakan salah satu tipe *governance/tata pemerintahan* dimana para aktor publik dan privat bekerja sama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum atau aturan untuk menentukan tindakan publik yang baik.

Upaya penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan oleh pemerintahan di setiap daerah, dimana pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keselamatan dan keamanan di jalan raya, tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya, pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendirian, pastilah ada bantuan-bantuan yang pemerintah dapatkan dari pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama terkait keselamatan dan keamanan.

Pemerintah dalam mewujudkan Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan telah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNKJ) Tahun 2011-2035 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, tetapi di Indonesia prinsip penyelenggaraan keselamatan transportasi sering kali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan.

Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNKJ) ini dilandasi dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk

menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNKJ). Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, telah membagi kewenangan tentang permasalahan lalu lintas kepada beberapa Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah selaku pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan publik.

Tabel 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas
di Kota Semarang

Indikator Kecelakaan	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Kejadian	872	1.083	936
Jumlah Korban	1.299	1.336	1.181
Jumlah Kendaraan yang terlibat	1.801	2.235	1.520

Sumber: Laka Lantas Polrestabes Semarang

Laka Lantas Polrestabes Semarang mengeluarkan data mengenai Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada periode tahun 2015 hingga tahun 2017. Jumlah Kecelakaan pada tahun 2015

sebanyak 872 kejadian dan tahun 2016 meningkat 24,2% menjadi 1.083 kejadian, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 13,57% menjadi 936 kejadian. Jumlah korban pada tahun 2015 sebanyak 1.299 korban dan tahun 2016 mengalami peningkatan 2,85% sebanyak 1.336 korban, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 11,6%. Jumlah Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan pada tahun 2015 sebanyak 1.801 kendaraan dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 24,1% menjadi 2.235 kendaraan, pada tahun 2017 mengalami penurunan 31,99% menjadi 1520 kendaraan.¹

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang masih perlu perhatian lebih lanjut dari para *stakeholders*, dapat dilihat dari data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang yang masih cukup tinggi pada tahun 2017 dengan

¹ Dikutip dari berita online Berita Semarang tanggal 28 Oktober 2017, *Tahun 2017 Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang* Menurun, www.beritasemarang.net/tahun-2017-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-semarang-menurun/4893/

jumlah kecelakaan sebanyak 936 kejadian yang melibatkan 1.520 kendaraan. Korban yang terdara akibat kecelakaan tersebut sebanyak 1.181 orang, dengan kerugian mencapai 944.900 juta rupiah. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang adalah faktor usia pegemudi pada rentang usia 21-40 tahun dengan persentase 51.05% pada periode tahun 2014 hingga 2017, hal ini berkaitan dengan tugas dari Satlantas Polrestabes sebagai penegak hukum dalam keselamatan lalu lintas di jalan yang kurang optimal dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, faktor kendaraan yang tidak memberi tanda isyarat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dengan rata-rata persentase sebesar 46.29%, hal ini berkaitan dengan kondisi kelaikan kendaraan bermotor tersebut dan merupakan tanggung jawab Dishub untuk menyelenggarakan pengujian kelaikan kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam *collaborative governance* terkait upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang?

KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah kegiatan mengelola organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintahan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui dua fokus yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen Publik berfokus pada orientasi bagaimana cara mengatur dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Kebijakan Publik berfokus pada orientasi pembuatan peraturan atau hukum yang digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan cara melakukan fungsi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya yang ada pada suatu organisasi. Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, awalnya dari paradigma *Old Publik Administration* (OPA) berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM) yang menyebabkan perubahan penyebutan *government* menjadi *governance*. Dari pergeseran paradigma inilah muncul istilah tentang *collaborative governance*, dengan melibatkan pihak ketiga selain institusi pemerintah, yaitu kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di public

3. Collaborative Governance

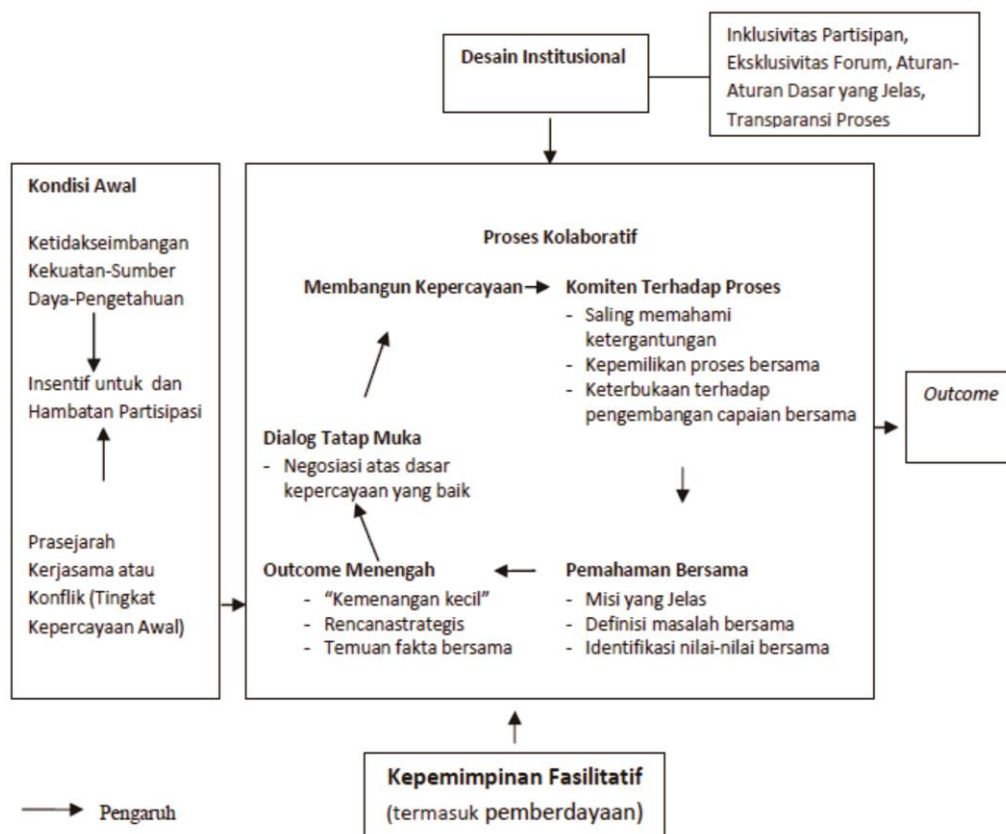
Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non-state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Menurut pendapat Ansell dan Gash *collaborative governance* merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para *stakeholders* memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling

menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing *stakeholders*, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh *stakeholders*, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan,

memfasilitasi dialog antar *stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama. Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum.

Gambar 1
Model Collaborative Governance Ansell And Gash



Sumber: Ansell & Gash, 2007:550

Proses kolaboratif ini dimana proses kolaboratif diawali merupakan variable yang penting, dengan dialog tatap muka yang

berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para *stakeholders* tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para *stakeholders* memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi. Adapun indikator kesuksesan dalam proses tata kelola kolaborasi yaitu mengikutsertakan semua; transparan dan bertanggung jawab; efektif dan adil; menjamin supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; dan memperhatikan yang lemah dalam pengambilan keputusan (UNDP dalam TIM DPAK Dikti, 2005)

Kolaborasi dalam *governance* menurut De Seve dan Sudarmo (2011:110-116) ada 8 indikator yang bisa menilai apakah kolaborasi yang

dilakukan pemerintah sudah bisa dikatakan berhasil atau gagal, yaitu:

1. *Networked structure*
2. *Commitment to common purpose*
3. *Trust among the participants*
4. *Governance*
5. *Access to authority*
6. *Distributive accountability/responsibility*
7. *Information sharing*
8. *Access to resources*

METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian dekriptif kualitatif dengan situs penelitian di Dinas Perhubungan Kota Semarang, Satlantas Polrestabes Semarang dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, tindakan dan sumber tertulis. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive* dan *snowball*. Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* dalam upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan di Kota Semarang

a. Kondisi Awal

Kondisi awal kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan sumber daya dan wewenang yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang menyebabkan terjadinya kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, didukung dengan sejarah kerjasama yang ada dan sudah dilakukan oleh para *stakeholders* sebelumnya juga menjadikan lebih mudah terselenggaranya kolaborasi ini dan dibuatkan forum secara legal dengan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang agar dalam melakukan koordinasi dan pembahasan mengenai permasalahan lalu lintas lebih mudah dilakukan.

b. Desain Institusional

Desain Institusional Kolaborasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang menggunakan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah cukup jelas tentang bagaimana pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pembagian tugas dan siapa saja yang wajib melaksanakannya dan juga menggunakan Keputusan Walikota Semarang No 551.2/310 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota Semarang sebagai pedoman untuk siapa saja yang berhak terlibat dalam kolaborasi. Untuk kejelasan SOP dari masing-masing *stakeholders* sudah cukup jelas untuk digunakan dalam menjalankan tupoksi dan kegiatan mereka terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang belum berjalan secara optimal, karena pelaksanaan Forum LLAJ yang ada masih dilaksanakan secara situasional dan jika diperlukan saja, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kurang optimal juga dalam melibatkan peran *stakeholders* yang terlibat karena hanya dilakukan melalui komunikasi lewat grup whatsapp saja. Peran *stakeholders* yang terlibat didasarkan pada tupoksi masing-masing *stakeholder* dengan melakukan kegiatan kolaborasi yang berupa kegiatan perencanaan dan kegiatan implementasi. Pengawasan kegiatan kolaborasi dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* secara internal dan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Instansi, selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat tetapi masih belum dilakukan secara optimal karena belum melibatkan secara langsung

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

d. Proses Kolaboratif

Proses Kolaboratif pada Kolaborasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaboratif sudah berjalan dengan baik dengan didukung variabel dialog tatap muka yang berkaitan dengan komunikasi dilakukan secara formal dan informal sudah baik melalui Forum LLAJ, saling bertukar informasi antar *stakeholder* juga. Komunikasi lebih sering dilakukan secara tidak formal melalui grup whatsapp, dan komunikasi melalui Forum LLAJ dilakukan secara situasional dan tiap tahunnya tidak tetap pelaksanaannya. Kepercayaan dan Komitmen dari setiap *stakeholders* sudah cukup tinggi, dapat dilihat dari sejarah kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya mengakibatkan lebih mudah dalam membangun kepercayaan dan komitmen mereka dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan

yang diberikan. Pemahaman bersama berkaitan dengan visi-misi yang menjadi dasar kolaborasi ini sudah jelas, tujuannya juga jelas untuk mengurangi angka kecelakaan di Kota Semarang dan mewujudkan Indonesia sebagai Negara dengan Keselamatan Jalan terbaik di Asia Tenggara dan dalam proses pengkajian masalah dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* dan dilakukan secara bersama melalui Forum LLAJ untuk menghasilkan keputusan bersama. Outcome menengah yang terjadi dalam kolaborasi yaitu perumusan Renstra yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders*, tetapi dalam proses perumusannya masih belum melibatkan peran masyarakat karena dianggap masyarakat sebagai penerima saja.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam *collaborative governance* terkait upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang

Faktor pendorong kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan di Kota Semarang dapat diketahui bahwa faktor pendorong yang dapat membuat kolaborasi berjalan dengan baik yaitu *networked structure* yang ada sudah jelas dengan Dinas Perhubungan yang menjadi *leading sector* dan tidak ada jenjang hirarki antar anggota kolaborasi, semuanya memiliki kedudukan yang sama dan jaringannya berbentuk horizontal; *commitment to a common purpose* yang cukup tinggi diperlihatkan oleh masing-masing *stakeholders* dengan melaksanakan kegiatan kolaborasi berdasarkan tupoksi masing-masing dan melakukan inovasi-inovasi baru dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; *distributive accountability/responsibility* dalam kolaborasi sudah jelas dengan melakukan proses pengambilan keputusan secara bersama-sama melalui Forum LLAJ dan pembagian wewenangnya yang didasarkan pada tupoksi masing-masing *stakeholder* yang sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan *information sharing* antar *stakeholder* yang cukup baik

pelaksanaannya dengan saling melakukan pertukaran informasi antar *stakeholders* yang terlibat dengan meminta secara langsung kepada *stakeholder* yang menyediakan informasi atau data tersebut dan keterbukaan dari masing-masing *stakeholder* cukup baik.

Faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang yaitu *access to resources* yang ada pada masing-masing *stakeholder* yang terlibat kolaborasi seperti Sumber Daya Manusia yang dimiliki dari segi kuantitas masih belum memadai atau mencukupi yang mengakibatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia yang ada menjadi kurang baik, sehingga dalam pelayanan yang diberikan kurang optimal, dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia dari masing-masing *stakeholder* juga tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Keuangan yang dimiliki oleh

masing-masing *stakeholder* juga terbatas jumlahnya.

KESIMPULAN

1. *Collaborative Governance* dalam upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan di Kota Semarang

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa telah dilaksanakan dengan cukup baik, berdasarkan dari fenomena Kondisi Awal, Desain Institusional dan Proses Kolaboratif, tetapi masih ada fenomena yang kurang optimal dalam pelaksanaannya yaitu terkait Kepemimpinan Fasilitatif dalam kolaborasi. Kondisi awal dari terbentuknya kolaborasi ini yaitu adanya ketidakseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dan perbedaan kewenangan yang dimiliki yang membuat tingkat kepercayaan dan komitmen dari *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi cukup tinggi yang dapat dijadikan modal

bagus dalam pelaksanaan kolaborasi. Desain Institusional didasarkan pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Keputusan Walikota Semarang No 551.2/310 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) Kota Semarang yang digunakan sebagai siapa saja stakeholders yang dapat terlibat dalam kolaborasi ini. Proses kolaboratif sudah berjalan baik dengan dialog tatap muka melalui Forum LLAJ dan kepercayaan serta komitmen seluruh stakeholders cukup tinggi yang dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan fasilitatif belum berjalan secara optimal karena pelaksanaan Forum LLAJ dilakukan secara situasional dan tidak ada patokan setiap tahunnya harus menyelenggarakan Forum LLAJ yang mengakibatkan pemberdayaan dalam kolaborasi tidak maksimal.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam *collaborative governance* terkait upaya pelaksanaan keselamatan

lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang

Faktor Pendorong dalam *collaborative governance* terkait upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang ada empat yaitu pertama, *networked structure* yang sudah jelas dengan jenis struktur jaringan kolaborasi *lead organization* yang seluruh anggotanya memiliki jenjang hirarki yang sama dengan menunjuk salah satu anggota sebagai seorang *leading* atau manajer yaitu Dinas Perhubungan. Kedua, *commitment to a common purpose* yang dimiliki setiap *stakeholder* cukup tinggi dengan melakukan inovasi baru yang mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Ketiga, *distributive accountability/responsibility* yang jelas terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kolaborasi ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, pembagian wewenang yang sudah cukup jelas berdasarkan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keempat, *information sharing* sudah baik

dengan saling berbagi informasi yang dimiliki, mereka hanya perlu meminta secara langsung kepada instansi yang bersangkutan.

Faktor penghambat dalam *collaborative governance* terkait upaya pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang adalah *access to resources* yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki masing-masing instansi yang masih belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan masing-masing instansi, selain itu Sumber Keuangan juga menjadi kendala yang serius karena keterbatasan dana yang dimiliki setiap instansi mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara maksimal, karena setiap dana yang diberikan kepada masing-masing instansi harus dibagi lagi untuk membiayai beberapa kegiatan selain kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam

upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut,

1. Sebaiknya kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan pemberdayaan dilakukan paling tidak enam bulan sekali dengan mengadakan Forum LLAJ, agar dapat mengetahui perkembangan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi dan dapat mengontrol kegiatan dilapangan.
2. Untuk mengatasi *access to resources* yang menjadi penghambat dalam kolaborasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang maka
 - a. Terkait Sumber Daya Manusia pada setiap instansi, perlu melakukan dan mengadakan rekrutmen pegawai atau melakukan perekrutan pegawai kontrak agar lebih efisien dan meminimalisir pengeluaran.
 - b. Terkait kekurangan Sumber Dana pada setiap instansi, perlu

melakukan perencanaan yang matang dan memperhatikan prioritas apa yang akan dilakukan agar dana dapat dikelola lebih efisien dan efektif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportasi: Terori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- David, Fred R. 2009. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Glueck, William F., dan Jauch, Lawrence R. 1991. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Hunger, J. David., dan Thomas L. Wheelen. 2011. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi
- Islamy, La Ode Syaiful H. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relation : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti
- Keban, T. Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, M.B, Huberman, A.M. dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pearce II, John A., dan Robison, Jr., Richard B. 2011. *Manajemen Strategis- Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sudarmo. 2011. *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jurnal:**
- Anggarasena, Bima. 2010. *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Tesis. Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal Of Public Administration Research and Theory*. University of California, Barkley (543-571).
- Arifin, Syamsul dan Utami Dewi. *Collaborative Governance dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangani Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*. *Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial UNY* (h.315-332). <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/viewFile/12672/12213>.
- Chantika, Otovinur Dwi. 2013. *Kinerja Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya*. *Jurnal: Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 Nomor 1* (h.6-11). <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-2.%20Otovinur%20KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf>
- Darmawati. 2016. *Kualitas Pelayanan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor di UPTD Dinsa Perhubungan Kota Samarinda*. *Jurnal: Administrasi Negara Vol. 4 Nomor 3* (hal 4622-4634). [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Cetak%20\(08-26-16-03-50-15\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/Jurnal%20Cetak%20(08-26-16-03-50-15).pdf)
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo)*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Dwiyogo, P dan Prabowo. 2006. *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksites) Pada Jalan Tol Jagorawi*. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Sipil. Universitas Diponegoro. Semarang
- Erkaningrum, Indri F. *Collaborative Governance: Daya Upaya Perguruan Tinggi Merealisasikan Harapan Pemangku Kepentingan*.
- Harmawan, Bagus Nuari; Inti Wastiti dan Hermanto Rohman. 2017. *Collaborative Governance dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Jurnal: E-SOSPOL Universitas Jember Vol IV Edisi 1, Jan-Apr 2017 (h.50-55).
<http://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/5615/4181>
- Irawan, Denny. 2017. *Collaborative Governance (Studi Deskripsi Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: (h.1-12).
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp90388af27afull.pdf>.
- Junaidi. 2016. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji: (h.1-35).
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/jurnal-1.pdf.
- Kurniasih, Denok; Paulus Israwan Setyoko; dan Moh. Imron. 2017. *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Sosiohumaniora Universitas Jenderal: (h.1-7).
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/7888/pdf>.
- Lukito dan Aris Tri Haryanto. 2016. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kerajinan Blangkon di Kecamatan Serengan Kota Surakarta*. Jurnal Universitas Sriwijaya: (h.1-16).
<http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/download/1195/1036>.
- Mutiawati, Tika dan Sudarmo. 2017. *Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2, 2017 (h.48-62).
<https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/download/16500/13308>.
- Zaenuri, Muchamad; Sumartono; Soesilo Zauhar; dan Andy Fefta Wijaya. 2015. *Tourism Affair Management*

*with Collaborative
Governance Approach:
Tourism Affairs
Management Studies in
Sleman Regency,
Yogyakarta. International
Journal of Management and
Administrative Sciences
(IJMAS) Vol 2, No 06 (h.1-
14). [http://www.ijmas.org/2-
6/IJMAS-2903-2015.pdf](http://www.ijmas.org/2-6/IJMAS-2903-2015.pdf).*

Regulasi:

Undang-undang No 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun
2017 tentang Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kota
Semarang

Sumber lain:

Irwanto, Deny. 2017. *Tahun 2017,
Angka Kecelakaan Lalu Lintas
Di Kota Semarang Menurun.*
[www.beritasemarang.net/tahun-
2017-angka-kecelakaan-lalu-
lintas-di-kota-semarang-
menurun/4893/](http://www.beritasemarang.net/tahun-2017-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-semarang-menurun/4893/). diakses pada
13 Desember 2017.

Dokumen Rencana Aksi Kepolisian
Negara Republik Indonesia:
Membangun Masa Depan
Keselamatan Lalu Lintas di
Indonesia.

Rencana Umum Nasional
Keselamatan Jalan
(RUNKJ) 2011-2035.